

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anwar, Yozar. 1990, *Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan*, ctk. Ketiga, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Direktoral Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jendral Pajak, 2010, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton, 2004, *Hukum Pajak edisi Revisi*, Salemba Empat, Jakarta
- , 2008, *Hukum Pajak edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta.
- Isnaini Wahyu Utomo, Hatta. 2020, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Mardiasmo, 1999, *Perpajakan*, ctk. Pertama, Andi, Yogyakarta.
- , 2011, *Perpajakan*, edisi Rev thn 2011, Andi, Yogyakarta.
- Munawir, 1992, *Perpajakan*, ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Muqodim, 1993, *Perpajakan Buku I*, Edisi 2, Ctk Pertama, UII Press, Yogyakarta, hlm.1
- Mustofa, 2010, *Tuntutan Pembuat Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.
- Pahala Siahaan, Marihot, 2003, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- , 2005, *Bea Peolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktik*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pramukti, Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2018, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Riwuhkabo, Josef, 1991, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Salim HS, 2019, *Peraturan Jabatan & Kode Etik PPAT*, Rajawali Pers, Depok.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Medpress Digital, Yogyakarta.

2. Peraturan PerUndang-Undangan dan Peraturan lainnya

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, *tentang Kode Etik PPAT Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 *Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 *tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *Tentang Pendaftaran Tanah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3696)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 *Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

3. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 20/Pid.B/2017/ PN Smn.

4. Internet

ippatkabbandung.or.id, *Sekilas tentang IPPAT*,

<https://ippatkabbandung.or.id/>, diakses pada tanggal 06 Juni 2021, pukul 13.20 WIB

klikpajak.id, *Ketahui indikator kepatuhan pajak lewat sistem self*

assessment, <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2021, pukul 19.32 WIB

indopajak.id, *Kepatuhan pajak di Indoensia*,

<https://indopajak.id/kepatuhan-pajak-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021, pukul 20.50 WIB

atrbpn.go.id, *Daftar PPAT & PPATS*,

<https://www.atrbpn.go.id/?menu=daftarPPAT>, diakses pada tanggal 29 Juli 2021, pukul 20.46 WIB

4. Thesis

Hesti Nuraini, 2016, *Peranan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bantul*, Thesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Yosepin Nauli Purba, 2019, *Kepatuhan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Transaksi Jual Beli Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Samosir*, tesis di Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.